

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perdebatan mengenai Islam dan negara sudah terjadi sejak lama, dan menjadi hal yang menarik dalam dunia politik. Begitu juga di Indonesia, perdebatan antara keduanya sudah terjadi sebelum Indonesia merdeka. Para tokoh Indonesia memiliki perbedaan pendapat mengenai ideologi negara, para tokoh nasionalis seperti Ir. Soekarno memilih pancasila sebagai ideologi negara. Sedangkan kalangan tokoh muslim seperti Muhammad Natsir menginginkan Islam sebagai ideologi negara Indonesia.

Dalam dunia Islam terdapat tiga aliran tentang realasi<sup>1</sup> Islam dan ketatanagaraan. *Pertama*, berpendapat bahwa Islam adalah agama yang lengkap dan mencakup pengaturan kehidupan manusia termasuk ketatanagaraan. *Kedua*, berpendapat bahwa Islam tidak memiliki hubungan ketatanagaraan (pengertian Barat). *Ketiga*, aliran ini menolak pendapat Islam adalah agama yang lengkap dan juga menolak pendapat Islam tidak memiliki hubungan dengan ketatanagaraan, aliran ini mnegatakan bahwa dalam Islam terdapat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.<sup>2</sup>

Islam dan negara di Indonesia memiliki hubungan yang kurang harmonis, disebabkan karena adanya perbedaan pendapat pada pendiri Republik Indonesia

---

<sup>1</sup>Relasi adalah perhubungan, pertalian. Hubungan adalah sesuatu yang terjadi apabila dua orang atau hal atau keadaan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Lihat Risa Agustin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Serba Jaya, tth, hlm. 528.

<sup>2</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993, hlm. 1.

yang sebagian besar umat muslim. Salah satu masalah yang menjadi perbedaan pendapat adalah apakah negara bercorak Islam atau nasionalis?. Konstruksi kenegaraan pertama mengharuskan Islam diakui dan diterima sebagai ideologi negara. Sedangkan konstruksi kenegaraan kedua mendesak agar negara ini didasarkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara.<sup>3</sup>

Perdebatan mengenai apakah Islam atau Pancasila sebagai ideologi negara terjadi pada era demokrasi liberal dan sudah termasuk dalam wacana sejarah. Dimana antara kaum nasionalis sekular mendukung Pancasila sebagai ideologi dasar Negara. Sedangkan kaum nasionalis Islam menginginkan Islam menjadi dasar Negara Indonesia. Menurut kaum ini, Pancasila bersifat netral dan tidak memiliki basis moral agama.<sup>4</sup>

Perdebatan mengenai ideologi negara Indonesia membuat para tokoh nasionalis maupun tokoh muslim Indonesia mengalami masa sulit. Namun, melalui Piagam Jakarta akhirnya telah disepakati bahwa Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, dengan merumuskan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Kesepakatan ini dikemukakan oleh Soekarno pada 18 Agustus 1945. Kebijakan ini dilakukan untuk menghindari diskriminasi antar umat beragama, karena Indonesia mempunyai banyak ragam suku, budaya, dan agama.<sup>5</sup>

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila bukan berarti tidak berhubungan dengan agama. Hal ini terbukti dengan berdirinya Kementerian Agama yang

---

<sup>3</sup>Muhammad Fauzan Naufal, *Hubungan Agama dan Negara Dalam Pemikiran Politik Islam di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Bahtiar Efendy)*, Lampung, UIN Raden Intan, 2017, hlm. 5.

<sup>4</sup>Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 326.

<sup>5</sup>Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan dalam Konstituante*, Bandung, PT Mizan Pustaka, 2017, hlm. 150.

mempunyai misi meningkatkan kerukunan hidup antara umat-umat dari berbagai agama. Berarti pemerintahan Indonesia mencampuri langsung kehidupan keagamaan rakyatnya. Pancasila sebagai ideologi negara untuk kepentingan masyarakat secara umum, baik dari aspek politik maupun sosial-ekonomi.<sup>6</sup>

Indonesia merupakan negara yang memiliki beberapa keyakinan (agama) yang dianut oleh masyarakatnya. Sehingga, Indonesia merupakan negara yang beragama, bukan negara yang berdasarkan agama tertentu, dan juga bukan pula negara sekular yang memisahkan anatar agama dan negara. Pemerintah Indonesia melindungi dan memberikan hak dan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama masing-masing dan tidak ada unsur keterpaksaan. Kebijakan ini terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Konsep agama dan negara terbagi menjadi tiga kelompok. *Kelompok pertama*, kelompok yang berpendapat bahwa agama dan negara bersifat integral (tidak dapat dipisahkan). *Kelompok kedua*, berpendapat bahwa agama dan negara bersifat sekularistik, dan kelompok ini menolak hubungan integralistik maupun hubungan simbiotik antara agama dan negara. *Kelompok ketiga*, berpendapat bahwa agama dan negara bersifat simbiotik (saling membutuhkan).<sup>7</sup>

Relasi Islam dan negara di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara, Islam menyatu dengan aktifitas politik dan para penguasanya. Sementara pada masa penjajahan, Islam menjadi kekuatan perlawanan terhadap kolonialisme. Seiring dengan perkembangan masa,

---

<sup>6</sup>Dedy Faisal, *Islam dan Negara (Negara Pancasila Menurut Pemikiran Munawir Sjadzali)*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2007, hlm. 6.

<sup>7</sup>Ahmad Kusairi, *Hubungan Agama Dan Negara: Studi Atas Partau Keadilan Sejahtera*, Yogyakarta, 2010, 131.

antara Islam dan kekuasaan memiliki hubungan yang semakin baik.<sup>8</sup> Sehingga, Islam dijadikan sebagai etika dalam bernegara, seperti prinsip ajarannya meliputi kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, prinsip keadilan sosial, prinsip persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian dan keselamatan, prinsip kesejahteraan, prinsip ketaatan rakyat. Semua hal ini akan menjadi lebih sempurna jika dalam menjalankannya dilandasi dengan al- Qur'an dan hadits.<sup>9</sup>

Menurut Abdurrahman Wahid ada sikap dan kebijakan politik yang tidak perlu dijelaskan kepada umat. Karena, politik bagi beliau merupakan sesuatu yang sangat nyata, sebagai pergulatan gagasa- gagasan dan kekuatan- kekuatan.<sup>10</sup> Begitupun pemikiran Abdurrahman Wahid tentang agama dan negara yang berada pada ranah filosofis. Beliau bukanlah seorang ideolog Islam yang menceritakan bentuk masyarakat Islam, bukan pula kaum sekuler yang memisahkan agama dan negara. Tetapi beliau adalah seorang muslim yang mendasarkan politik pada kesejahteraan manusia dari sumber- sumber keislaman. Ia juga menolak gagasan negara Islam.<sup>11</sup>

Namun demikian kata Abdurrahman Wahid yang dikutip oleh M. Syafi'i Anwar, tidak ada halangan bagi seorang muslim untuk menjadi nasionalis. Pada masa modern ini, wawasan kebangsaan memiliki pengertian satuan politis yang didukung oleh ideologi nasional. Menurut Abdurrahman Wahid, maksud dari

---

<sup>8</sup>Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam...*, hlm. 326.

<sup>9</sup>Faisal Baasir, *Etika Politik: Pandangan Seorang Politis Muslim*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 144.

<sup>10</sup>Abdurrahman Wahid, *Membaca Sejarah Nusantara (25 Kolom Sejarah Gus Dur)*, Yogyakarta, Lkis, 2010, hlm. V.

<sup>11</sup>Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita (Agama Masyarakat Negara Demokrasi)*, Jakarta, Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2011, hlm. XV.

pengertian ini adalah konsep negara bangsa (*nation state*). Maka pada masa modern ini, Islam harus berinteraksi dengan sederetan fenomena yang secara global yang merupakan *nation state*.<sup>12</sup>

Dari sekian banyak pendapat atau perdebatan mengenai relasi Islam dengan negara khususnya di Indonesia, tetap memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencapai kebaikan dan kebahagiaan, hanya cara pandangnya yang membedakan. Namun pada dasarnya, kesemuanya ingin mengarah pada kebaikan dan meninggalkan hal yang buruk, agar hidup aman, tentram dan bahagia. Maka dari itu para tokoh muslim maupun nasionalis harus mampu menempatkan Islam dan negara dalam posisi yang pas sebagaimana mestinya.

Di Indonesia, umat Islam tidak mendirikan negara Islam tetapi negara bangsa yang berdasarkan ideologi pancasila. Negara pancasila bukan negara agama dan bukan negara sekuler karena pancasila mengakui adanya Tuhan Yang Esa, disamping adanya suatu kementrian/ lembaga yang mengurus kepentingan umat Islam dalam menjalankan ibadahnya.

Negara Indonesia merupakan negara republik dan masyarakatnya mayoritas beragama Islam, sehingga dalam hal ini akan melibatkan masyarakat muslim maupun non muslim dalam mengaplikasikan kehidupan termasuk didalamnya yaitu bidang politik. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “*Relasi Islam dan Negara di Indonesia Menurut Abdurrahman Wahid*”.

---

<sup>12</sup>M. Safi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia*, Jakarta, Paramadina, 1995, cet. 1, hlm. 194.

**B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa Abdurrahman Wahid menolak negara Indonesia menjadi negara Islam?
2. Bagaimana relasi antara Islam dan negara di Indonesia menurut Abdurrahman Wahid?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui alasan mengapa Abdurrahman Wahid menolak negara Indonesia menjadi negara Islam.
- b. Memahami bagaimana relasi antara Islam dan negara di Indonesia menurut Abdurrahman Wahid.

**2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan persoalan dan tujuan tersebut, kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi bagi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam.
- b. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai sumber referensi bagi yang berkepentingan.

- c. Secara praktis dapat menjadi bahan pemikiran yang diharapkan bisa memberi wawasan, manfaat, pengetahuan, dan pemahaman yang ingin menjadikan negaranya memiliki pemimpin dan masyarakatnya yang berakhlak mulia.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka digunakan untuk bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu, mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang digunakan untuk mendapatkan landasan teori ilmiah. Sejauh penelusuran dan pengamatan peneliti ke berbagai literatur kepustakaan mengenai relasi Islam dengan negara di Indonesia, menemui beberapa tulisan dan penelitian. Untuk mendukung kajian yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis akan berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Berikut daftar penelitian yang sudah ada:

Buku Suyitno yang berjudul *Konsep Negara Menurut M. Natsir: Tinjauan Dalam Pemikiran Politik Islam*. Di dalam buku ini menjelaskan tentang hubungan agama dengan negara yang dikemukakan oleh M. Natsir. Islam menghendaki situasi negara yang lebih demokratis bukannya teokrasi seperti yang di pahami

oleh bangsa Barat dan itu juga merupakan corak dari negara. Corak seperti ini sangat cocok jika diterapkan di negara demokratis seperti Indonesia.<sup>13</sup>

Skripsi yang ditulis oleh M. Hafidz Ghozali jurusan Aqidah Filsafat yang berjudul *Hubungan Agama dan Negara Studi Atas Muqaddimah Ibn Khaldun*. Skripsi ini membahas tentang hubungan agama dan negara yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun atas muqaddimahnya. Menurut penulis skripsi ini bahwa pemikiran Ibnu Khaldun tentang agama dan negara ditempatkan secara dialektis. Tanpa negara, hukum agama tidak dapat ditegakkan. Dengan agama, negara mendasarkan moralitas dan legitimasinya.<sup>14</sup>

Tesis Ma'mun Murod tahun 1999 di Program Studi Ilmu- Ilmu Sosial, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga dengan judul “ *Agama dan Negara di Indonesia: Suatu Perbandingan Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid dan Amien Rais tentang Hubungan Agama dan Negara*” yang kemudian menjadi buku berjudul “*Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais tentang Negara*” (Jakarta: Rajawali Pers, 1999). Tulisan ini lebih diletakkan pada pembahasan ilmu politik yang kemudian dihubungkan dengan aktivitas politik keduanya, tetapi tidak membicarakan dimensi kefilosofan dari pemikiran keduanya.

Skripsi yang ditulis oleh Ihsan Maulana yang berjudul *Pola Hubungan Islam dan Negara dalam Pemikiran Jaringan Islam Liberal*. Dalam Skripsi ini menurut penulis bahwa dalam hubungan Islam dan negara JIL mengatakan bahwa

---

<sup>13</sup>Suyitno, *Konsep Negara Menurut M. Natsir: Tinjauan Dalam Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2015, cet.1, hlm. 6.

<sup>14</sup>M. Hafidz Ghozali, *Hubungan Agama dan Negara Studi Atas Muqaddimah Ibn Khaldun*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2008, hlm. xiii.



Islam dan negara adalah sesuatu yang berbeda dan harus dipisahkan. Hal ini jelas tertera dalam buku *Wajah Islam Liberal di Indonesia*, JIL menolak adanya konsep negara Islam, dan konsep sekularisme sebagai pemisah antara negara dan agama yang merupakan konsep ideal untuk Indonesia.<sup>15</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian baik dari buku maupun skripsi di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Karena dalam penelitian ini akan memfokuskan penelitian kepada relasi Islam dengan negara yang ada di Indonesia menurut pandangan Abdurrahman Wahid.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang dihasilkan dari suatu data- data yang di kumpulkan berupa kata- kata yang diperoleh melalui beberapa literatur berkaitan dengan pokok permasalahan, dan merupakan suatu penelitian ilmiah. Bodgan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai suatu prosedur penelitian berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang diamati dan menghasilkan data deskriptif.<sup>16</sup> Dengan penjabaran sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada tulisan ini dilakukan dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan

---

<sup>15</sup>Ihsan Maulana, *Pola Hubungan Islam dan Negara dalam Pemikiran Jaringan Islam Liberal*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2009, hlm. 88.

<sup>16</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2009, cet. 26, hlm. 4.

menggunakan *literature* (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

## 2. Sumber Data

Ditinjau dari segi metodologinya yang bersifat kepuustakaan, maka data yang diperlukan adalah data yang bersumber dari kepuustakaan, yang berhubungan dengan obyek permasalahan yang akan diteliti. Adapun sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber- sumber asli. Literature yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya Abdurrahman Wahid, antara lain: *Islamku Islam Anda Islam Kita (Agama Masyarakat Negara Demokrasi); Mengurai Hubungan Agama dan Negara; Kiai Nyentrik Membela Pemerintahan; Membaca Sejarah Nusantara (25 Kolom Sejarah Gus Dur); Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia; Membangun Demokrasi; Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan; Prisma Pemikiran Gus Dur; Islam Kosmopolitan (Nilai- Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan); Tuhan Tidak Perlu di Bela.*

### b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder atau data penunjang dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan tema, baik berupa buku, artikel, maupun tulisan lainnya. Sumber ini diambil

untuk dijadikan alat bantu dalam menganalisa masalah-masalah yang berkaitan dengan tema penelitian. Seperti, buku Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: karya Ahmad Syafii Maarif, Skripsi Hubungan Agama dan Negara dalam Pemikiran Politik Islam di Indonesia: karya Muhammad Fauzan Naufal, Konsep Negara Menurut M. Natsir: karya Suyuti, dan buku atau karya ilmiah penunjang lainnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, internet, ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian. Dan kemudian dikaji dan diteliti sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

### **4. Metode Analisis Data**

Setelah data terkumpul dan terinventarisasi, langkah selanjutnya adalah dengan mengelola data tersebut. Data tersebut dianalisis untuk mengkaji bagaimana relasi Islam dengan negara dengan menggunakan metode sebagai berikut:

#### **a. Metode Hermeneutik**

Hermeneutik berasal dari kata benda *Hermeia*, secara harfiah diartikan “penafsiran atau interpretasi”. Oleh karena itu, *Hermeneutik* diartikan proses mengubah sesuatu dari situasi ketidaktahuan menjadi mengerti, tetapi tidak bersifat objektif (menurut selera orang yang

menafsirkan) melainkan untuk mencapai kebenaran yang otentik.<sup>17</sup> Terkait dengan penelitian ini, metode ini digunakan guna untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang terkait dengan relasi Islam dengan negara, serta guna mendapatkan atau menangkap maksud dari pemikiran tokoh yang terkait dengan relasi Islam dengan negara, yaitu Abdurrahman Wahid. metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran dari penelitian yang dikaji.

b. Metode Holistika

Metode holistika merupakan metode yang berupaya mencapai kebenaran yang utuh dengan cara mengkaji dan menyelidiki objek penelitian dari seluruh kenyataan dalam hubungannya dengan objek itu sendiri dan hubungannya dengan kenyataan. Pandangan menyeluruh ini juga disebut *totalitas*; semua dipandang dalam kesinambungannya dalam satu totalitas.<sup>18</sup> Kaitan metode dengan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui atau mengungkap secara keseluruhan atau totalitas terhadap relasi Islam dengan negara itu sendiri di dalam negara Indonesia, dilihat dari berbagai segi.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam membaca dan memahami pokok-pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini, maka secara sistematis penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>17</sup>Anton Bakker, Achmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta, Kanisius, 1990, hlm. 102.

<sup>18</sup>Anton Bakker, Achmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*,... hlm. 47.

*Bab pertama* adalah pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua* berisi tinjauan umum tentang Islam dan Negara berupa definisi Islam dan negara, sejarah pemerintahan dalam Islam, perkembangan Islam di Indonesia, dan pandangan para tokoh muslim terhadap Islam dan negara.

*Bab ketiga* merupakan penelitian terhadap kehidupan Abdurrahman Wahid, yang berupa biografi beliau mulai dari sejarah pendidikannya, karya-karya beliau, serta perjalanan karirnya, dan dibahas pula karakteristik pemikiran beliau mengenai pluralisme dan demokrasi, humanisme, agama, Indonesia dan nasionalis, kebudayaan dan kesenian, serta tentang perempuan.

*Bab keempat* merupakan pandangan pemikiran Abdurrahman Wahid tentang relasi Islam dan negara, yang meliputi Islam dan negara perspektif Abdurrahman Wahid, dan pandangan Abdurrahman Wahid tentang relasi Islam dan negara di Indonesia.

*Bab kelima* merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini yang memuat kesimpulan dari semua analisis yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya dan saran-saran yang diperlukan sebagai acuan perbaikan bagi pembahasan lebih lanjut berkaitan dengan tema pokok skripsi ini.